

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 19 Agustus 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

98 Advokat Gugat

UU Pemilu

Sebanyak 98 pengacara yang bernaung dalam wadah Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM itu mendaftarkan gugatan ke MK, Jumat (18/8).

"Untuk itu, pada hari ini, 18 Agustus 2023, bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi, merupakan hari yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya dinamakan sebagai Jumat Glory," demikian keterangan pers Aliansi 98, Jumat (18/8).

Pasalnya, Aliansi 98 mengajukan permohonan judicial review UU Pemilu Pasal 169 huruf (d) dan (q) terhadap UUD 1945. Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf dan q, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya,

q. berusia paling rendah 40 tahun

Usia Capres/Cawapres

Terkait tindak pidana berat lainnya, Aliansi '98 menyatakan perlu diperjelas MK.

"Kami melihat UU Pemilihan Umum, yaitu pada pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, belum mencakup semua hal tersebut," katanya.

Seharusnya, kata Aliansi '98, pasal 169 yang mengatur tentang persyaratan tersebut menjadi benteng awal negara memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia.

"Dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada 1998, orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan

yang antidemokrasi, serta tindak pidana berat lainnya," ujarnya.

Adapun soal usia capres/cawapres, Aliansi '98 membandingkan dengan sejumlah jabatan lain. Yaitu: Usia Hakim konstitusi maksimal adalah 70 tahun. Usia Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun. Usia Wakil Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun. Usia hakim agung maksimal berusia 70 tahun. Usia anggota Komisi Yudisial (KY) maksimal 68 tahun. Usia Ketua BPK maksimal 67 tahun. Dan usia anggota BPK maksimal 67 tahun.

"Memiliki presiden yang mempunyai kemampuan secara fisik, psikologis, dan moral yang stabil (secara rohani dan jasmani) sehingga presiden yang terpilih merupakan sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerjanya. Untuk itu, batas usia maksimal calon presiden pada Pemilu 2024 harus negara (melalui Mahkamah Konstitusi) tetapkan dengan ketentuan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan presiden," tegasnya.

Pemohon menyatakan gugatannya itu sejalan dengan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, pelindung demokrasi, pelindung hak asasi manusia, penafsir final konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara.

"Dan pengawal ideologi negara," pungkasnya.(dtk-23)